

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pembangunan ekonomi (Halimah, et. al., 2024). Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya, yang didukung oleh kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang menyertainya (Jhingan, 2000:57). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional rill semakin berkembang (Imawan & Penangsang, 2021).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan serta acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah (Hartadi, 2022). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator penting yang digunakan pemerintah untuk menganalisis kondisi pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung, baik di tingkat nasional maupun daerah (Andriansyah & Ma'ruf, 2022).

Definisi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output secara

berkelanjutan melalui kemajuan teknologi dan perubahan struktural. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output produksi, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian

Teori Keynesian yang dikembangkan oleh Jhon Maynard Keynes melalui karyanya "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" (1936) menjelaskan bahwa perekonomian tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis. Fluktuasi permintaan agregat dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi seperti pengangguran dan resesi berkepanjangan. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal moneter. (Pokhrel, 2024).

Dalam kerangka Keynesian, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan program sosial, dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga mendorong produksi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya, pengurangan atau peningkatan pajak dilakukan ketika ekonomi mengalami tekanan inflasi. Dengan demikian, intervensi pemerintah melalui belanja publik berfungsi sebagai stimulus untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan dana perimbangan dan PAD memungkinkan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah

yang tercermin dalam komponen G (*Government*) , sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Keynes, kondisi makroekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh besarnya permintaan agregat. Ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan, perekonomian akan mengalami kekurangan produksi sehingga mendorong kenaikan output, harga atau keduanya. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara permintaan agregat dan kapasitas produksi. Inti kebijakan makroekonomi keynesian adalah bagaimana pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat agar perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat dirumuskan sebagai :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran Konsumsi

I = Investasi Swasta

G = Pengeluaran Pemerintah

X-M = Ekspor - Import

Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan dan kecenderungan mengonsumsi (*marginal propensity to consume*), investasi dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan serta tingkat suku bunga, sedangkan pengeluaran pemerintah bersifat eksogen dan ditentukan oleh kebijakan publik (Halimah, 2024).

Perubahan pada masing-masing komponen permintaan agregat akan memengaruhi tingkat output melalui proses pengganda (*multiplier effect*), yaitu setiap tambahan pengeluaran akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar secara berantai. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif Keynesian, pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam perekonomian, terutama ketika sektor swasta belum mampu menciptakan permintaan agregat yang memadai. Peningkatan pengeluaran pemerintah dipandang sebagai stimulus ekonomi yang efektif untuk mendorong permintaan agregat, meningkatkan output, serta menciptakan kesempatan kerja. Melalui mekanisme efek pengganda (*multiplier effect*), perluasan belanja publik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu menstabilkan perekonomian pada kondisi ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada masa perlambatan ekonomi (Rifki Dzikrulloh, 2024).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja publik. Peningkatan belanja tersebut tercermin pada komponen G dalam persamaan keynesian, sehingga memperbesar permintaan agregat di tingkat regional dan mendorong peningkatan output serta pertumbuhan ekonomi daerah (Rifki Dzikrulloh, 2024).

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

2.1.2.1 Definisi Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang berkembang pesat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola perekonomiannya secara mandiri sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Andrea, 2020). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai secara formal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Latifa et al., 2025).

Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal diproksikan melalui dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kapasitas fiskal daerah. Kajian mengenai desentralisasi fiskal berkembang dalam kerangka federalisme fiskal (*fiscal federalism*) yang dapat dikelompokkan ke dalam dua generasi teori, yaitu generasi pertama (*first generation theory*) dan generasi kedua (*second generation theory*) (Oates, 2006).

2.1.2.2 Teori Desentralisasi Fiskal

2.1.2.2.1 Teori Tiebout

Teori Tiebout dikemukakan oleh Charles M. Tiebout melalui konsep *A Pure Theory of Local Expenditures* (BKF, 2021). Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat dapat memilih lokasi tempat tinggal sesuai dengan kombinasi pajak dan

pelayanan publik yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Mekanisme ini dikenal dengan istilah *voting with their feet* atau memilih dengan berpindah wilayah.

Menurut Tiebout (BKF, 2021), kompetisi antar pemerintah daerah dalam menyediakan paket layanan publik dan struktur pajak yang berbeda-beda akan mendorong terciptanya efisiensi. Daerah yang mampu memberikan pelayanan publik lebih baik dengan biaya lebih rendah akan lebih menarik penduduk, sedangkan daerah yang kurang efisien akan kehilangan penduduk. Dengan demikian, mobilitas penduduk berperan sebagai mekanisme pasar yang mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pelayanan publik. Implikasi teori ini adalah bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan alokasi sumber daya publik yang lebih sesuai dengan preferensi lokal dibandingkan jika seluruh kebijakan dipusatkan pada pemerintah pusat (Ginting et al., 2019).

2.1.2.2.2 Teori Musgrave

Richard A. Musgrave mengembangkan teori keuangan publik dengan membagi fungsi pemerintah ke dalam tiga peran utama, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi distribusi, dan fungsi alokasi (BKF, 2021). Fungsi stabilisasi berkaitan dengan menjaga kestabilan makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan. Kedua fungsi tersebut dinilai lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena memerlukan kebijakan berskala nasional.

Sementara itu, fungsi alokasi berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang kebutuhannya berbeda antar daerah. Menurut Musgrave (BKF,

2021), pelimpahan kewenangan pengeluaran publik kepada daerah akan meningkatkan efisiensi karena kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan demikian, teori Musgrave memberikan dasar normatif bahwa pembagian tugas fiskal antara pusat dan daerah diperlukan untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ketiga fungsi tersebut saling berkaitan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi alokasi sebagai saluran utama pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.2.3 Teori Oates (Decentralization Theorem)

Wallace E. Oates menyempurnakan teori federalisme fiskal melalui apa yang dikenal sebagai *Decentralization Theorem* (Oates, 2006). Teorema ini menyatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah tingkat bawah (daerah), selama tidak terdapat eksternalitas antar wilayah dan preferensi masyarakat berbeda-beda (BKF, 2021).

Oates (2006) berpendapat bahwa pemerintah pusat cenderung menerapkan kebijakan yang seragam (*one size fits all*), sehingga kurang mampu mengakomodasi variasi kebutuhan lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan preferensi masyarakat setempat, sehingga dapat menyediakan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, desentralisasi juga mendorong persaingan antar daerah, inovasi kebijakan, serta berfungsi sebagai laboratorium kebijakan publik.

Namun demikian, Oates juga menekankan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam praktiknya dapat muncul masalah

ketimpangan fiskal antar daerah, lemahnya disiplin anggaran, serta perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, efektivitas desentralisasi sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan sistem pengawasan. Teori Oates menjadi landasan utama dalam banyak penelitian empiris mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi daerah (Manajemen, 2026).

2.1.2.2.4 Teori Local Federalism Generasi Kedua

Perkembangan literatur selanjutnya melahirkan teori federalisme fiskal generasi kedua (*second generation theory*) yang tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek politik, kelembagaan, serta perilaku aktor pemerintah. Pendekatan ini banyak dibahas dalam kajian literatur federalisme fiskal modern (Zayer & Benabdelhadi, 2020)

Berbeda dengan generasi pertama yang mengasumsikan pemerintah selalu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, generasi kedua berangkat dari perspektif *political economy* dan *public choice*. Pemerintah daerah dipandang memiliki kepentingan sendiri sehingga kebijakan fiskal dipengaruhi oleh insentif politik, akuntabilitas, asimetri informasi, serta potensi moral hazard.

Dalam perspektif ini, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh desain kelembagaan, sistem pengawasan, serta insentif yang tepat. Tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi dapat menimbulkan pemborosan anggaran, ketidakefisienan, bahkan ketidakdisiplinan fiskal. Oleh karena itu, teori generasi kedua menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Secara keseluruhan, teori desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah berpotensi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan kualitas pelayanan publik, terutama ketika preferensi masyarakat bersifat heterogen. Teori Tiebout, Musgrave, dan Oates memberikan dasar ekonomi mengenai pentingnya peran daerah dalam penyediaan barang publik. Sementara itu, teori generasi kedua melengkapi analisis dengan mempertimbangkan faktor insentif politik dan kelembagaan (Zayer & Benabdelhadi, 2020). Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana desentralisasi fiskal dapat memengaruhi kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia, implementasi *fiscal federalism* tercermin melalui kebijakan desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan seperti dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Melalui pengelolaan fiskal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Teori-teori tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana kapasitas fiskal daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

2.1.2.3 Desain Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dibangun dalam empat pilar utama yaitu: (1) politik; (2) administrasi; (3) fiskal; dan (4) ekonomi. Desentralisasi politik

diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan dalam politik kepada pemerintah daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi administrasi diimplementasikan melalui pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian besar pelayanan masyarakat. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya agar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Dalam praktik desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah pusat tidak hanya melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga merancang mekanisme transfer fiskal sebagai instrumen utama untuk menjaga pemerataan fiskal dan kapasitas penyediaan layanan publik di daerah. Instrumen tersebut dikenal sebagai dana perimbangan, yang berperan penting dalam mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta kesenjangan antar daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung et al., (2022) menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan memiliki peran signifikan dalam arsitektur keuangan daerah di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam melaksanakan fungsi publiknya. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Santi, 2021 menjelaskan bahwa komponen-komponen dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan determinan penting dalam derajat desentralisasi fiskal dan kemampuannya dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara agregat tentang konsep dan peranan dana perimbangan sebagai pilar utama dalam desain kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, serta implikasinya terhadap pemerataan fiskal dan pelayanan publik.

2.1.2.3.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Yuliawati et al., 2024). Lebih lanjut, Santi, (2021) menjelaskan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*), serta mengurangi perbedaan kemampuan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*) (BKF, 2021).

Istilah dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mulai digunakan secara resmi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang

kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Seiring perkembangannya, penguatan kebijakan dan tata kelola dana perimbangan juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN beserta peraturan turunannya. Pembagian dana perimbangan didasarkan pada luasnya wilayah suatu daerah. Tidak semua daerah mempunyai wilayah yang luas dapat mensejahterakan rakyatnya, semua itu tergantung kepada suatu daerah mampu atau tidaknya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (Bachtiar et al., 2018). Selama lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, jenis dan tujuan dana perimbangan terus mengalami penyempurnaan. Saat ini, dana perimbangan menjadi bagian dari skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Dana Transfer Umum (DTU) yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus (DTK) yang meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

2.1.2.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah alokasi dana dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran dana bagi hasil sangat penting dalam mendukung otonomi daerah karena besarnya diterima berdasarkan potensi daerah sebagai penghasil pendapatan, serta menjadi salah satu modal utama pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan

menutupi belanja yang tidak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin mendapatkan aliran dana bagi hasil yang lebih besar, daerah tersebut perlu mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimilikinya (Shoba & Fidiana, 2022).

Melalui mekanisme bagi hasil tersebut, pemerintah daerah memperoleh tambahan kapasitas fiskal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Ketersediaan dana ini memungkinkan daerah penghasil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonominya sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.1.2.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang digunakan untuk mencapai pemerataan fiskal. DAU berperan sebagai sarana pemerintah pusat dalam menangani ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah. Besaran DAU ditetapkan berdasarkan celah keuangan atau kebutuhan moneter yang belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah daerah (Priambodo & Hidayat, 2020). Melalui karakteristiknya yang tidak terikat pada kegiatan tertentu, DAU dapat digunakan untuk mendukung berbagai belanja daerah, baik belanja operasional maupun belanja pembangunan.

Dengan tersedianya dana tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,

secara konseptual DAU berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah. DAK bertujuan membantu pembiayaan program pembangunan yang bersifat spesifik, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan antar daerah. (Huda & Sumiati, 2019).

Secara umum, DAK terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperlancar aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, DAK Nonfisik dialokasikan untuk mendukung operasional pelayanan publik, seperti bantuan operasional pendidikan, layanan kesehatan, dan program pelayanan dasar lainnya, yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tersebut, DAK diharapkan dapat memperkuat produktivitas daerah, mendorong aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, secara konseptual DAK memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, variabel Dana Alokasi Khusus diukur menggunakan total realisasi DAK, yaitu penjumlahan antara DAK Fisik dan DAK Nonfisik, guna

merepresentasikan keseluruhan dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, variabel dana perimbangan tidak dianalisis secara terpisah berdasarkan komponennya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), melainkan digabungkan menjadi satu variabel agregat berupa dana perimbangan. Penggabungan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh transfer fiskal dari pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, penggunaan variabel agregat dana perimbangan bertujuan untuk menyederhanakan model analisis serta menghindari potensi permasalahan statistik, seperti multikolinearitas, yang dapat muncul apabila masing-masing komponen dianalisis secara terpisah. Dengan demikian, dana perimbangan dalam penelitian ini mencerminkan total keseluruhan dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Selain dana perimbangan sebagai instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat, kemampuan keuangan daerah juga ditentukan oleh sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah, oleh karena itu, pembahasan mengenai struktur fiskal daerah perlu dilengkapi dengan penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan internal pemerintah daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, PAD merujuk pada pendapatan yang dikumpulkan pemerintah daerah melalui pemungutan sesuai peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku (Mahfudh, Saleh Herudin, 2022).

Lebih lanjut, Pendapatan Asli Daerah adalah indikator kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar tingkat kemandirian daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat atau daerah lain berkurang. Kenaikan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber penerimaan yang dimiliki (Vianney, 2024). Lebih lanjut, PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang berperan dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu diantara bagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan yang Sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

2.1.3.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang setara. Pajak ini dapat dipungut sesuai peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pos-pos pajak daerah yang umum tercatat dalam Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok (Simanjuntak & Ginting, 2019).

2.1.3.1.2 Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kemandirian keuangan dan akuntabilitas daerah.

2.1.3.1.3 Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Nasir (2019), Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD

juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.1.3.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut (Nasir, 2019).

Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.1.4 Rasio Belanja Modal

2.1.4.1 Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja ini biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, serta fasilitas publik lainnya (Dwi Citra Haryati et al., 2025).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, belanja modal berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pelayanan publik.

2.1.4.2 Definisi Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah dalam suatu periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan total pengeluaran. Semakin tinggi rasio belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset produktif. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa pengeluaran lebih banyak digunakan untuk belanja rutin. Rasio belanja modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100$$

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak jangka panjang terhadap Pembangunan ekonomi daerah.

2.1.4.3 Teori Keuangan Publik (*Public Finance*)

Dalam kajian ekonomi, *Public Finance* atau keuangan publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Keuangan publik didefinisikan sebagai studi mengenai bagaimana pemerintah melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat . Peran pemerintah tersebut mencakup penyediaan layanan publik, pengaturan distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi (Biswan, 2022).

Dalam teori keuangan publik, aktivitas pemerintah dilihat dari dua sisi utama, yaitu sisi penerimaan (*revenue*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*). Dari sisi pengeluaran, pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pengeluaran pemerintah, termasuk belanja daerah, merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara efisien, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah (Biswan, 2022).

Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang penting adalah belanja modal, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset jangka panjang. Dalam konteks ini, menurut Richard Musgrave belanja modal merupakan implementasi dari fungsi alokasi pemerintah dalam menyediakan barang publik (*public goods*) seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Infrastruktur

tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas, efisiensi ekonomi, serta mendorong aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan belanja daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran yang tepat pada sektor produktif, khususnya melalui belanja modal, dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah dan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dalam perspektif keuangan publik, kualitas pengeluaran pemerintah menjadi salah satu determinan utama dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

2.1.4.4 Teori Keynes (Pengaruh Jangka Pendek)

Teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi (Suryono, 2001).

Belanja modal sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset publik. Peningkatan belanja modal akan menciptakan efek multiplier dalam perekonomian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan output nasional dalam jangka pendek. Dengan demikian, rasio belanja modal yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat.

2.1.4.5 Teori Pertumbuhan Endogen (Pengaruh Jangka Panjang)

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti investasi dalam infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi. Dalam teori ini, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas (Juhro & Trisnanto, 2018).

Belanja modal pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, menurunkan biaya produksi, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang lebih besar mencerminkan adanya investasi pemerintah yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.1.4.6 Teori Pertumbuhan Neoklasik (Peran Modal dalam Produksi)

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam konteks ini, modal fisik (*capital stock*) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kapasitas produksi suatu perekonomian (Suryono, 2001).

Belanja modal pemerintah merupakan bentuk investasi dalam modal fisik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Peningkatan belanja modal akan menambah stok modal dalam perekonomian, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan output. Dengan demikian, rasio belanja

modal yang tinggi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akumulasi modal.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.5.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, IPM tidak hanya mengukur aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (BPS, 2015).

IPM digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah (BPS, 2015).

2.1.5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi kesehatan, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), yang mencerminkan peluang hidup penduduk sejak lahir.

2. Dimensi pendidikan, diukur melalui dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat.
3. Dimensi standar hidup layak, diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat.

Ketiga komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup manusia secara komprehensif, sehingga IPM mampu memberikan gambaran yang lebih luas dibandingkan hanya menggunakan indikator ekonomi semata (BPS, 2015).

2.1.5.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dilakukan dengan menggabungkan ketiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, ke dalam suatu indeks komposit. Masing-masing dimensi terlebih dahulu dihitung indeksnya, kemudian digabungkan menggunakan metode rata-rata geometrik.

$$IPM = 3 \sqrt{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Pendekatan rata-rata geometrik digunakan untuk mencerminkan bahwa ketiga dimensi tersebut memiliki peran yang sama penting dan saling melengkapi. Dengan metode ini, nilai IPM akan lebih sensitif terhadap ketimpangan antar dimensi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat pembangunan manusia. Dengan demikian, IPM dapat digunakan sebagai alat ukur

yang komprehensif dalam menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan (BPS, 2015).

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, hubungan antara belanja daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui *Cobb-Douglas Production Function* (Antoro et al., 2025). Model ini menyatakan bahwa output ekonomi merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Secara umum, fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

di mana Y merupakan output atau pertumbuhan ekonomi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan A mencerminkan tingkat teknologi atau efisiensi. Dalam konteks ekonomi daerah, modal dapat diproksikan melalui belanja modal pemerintah, sedangkan tenaga kerja mencerminkan jumlah angkatan kerja.

Seiring dengan perkembangan teori pertumbuhan, kualitas tenaga kerja juga menjadi faktor penting yang dikenal sebagai human capital. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai proksi kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, fungsi produksi dapat dimodifikasi dengan memasukkan unsur human capital sebagai berikut:

$$Y = AK^{\alpha}(HL)^{\beta}$$

di mana H merepresentasikan human capital yang diproksikan oleh IPM. Model ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, kombinasi antara belanja modal sebagai bentuk investasi fisik dan IPM sebagai representasi human capital menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja ekonomi daerah.

2.1.5.4 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia (*Human Capital Theory*) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Gary Becker (Hasan et al., 2020), human capital mencakup pengetahuan, keterampilan, pendidikan, serta kesehatan yang dimiliki individu yang dapat meningkatkan kemampuan produktifnya. Investasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hasan et al., 2020).

Dalam perspektif ekonomi, human capital merupakan bagian dari faktor produksi selain modal fisik dan sumber daya alam. Peningkatan kualitas human capital akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Theodore Schultz yang menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan output ekonomi (Burhanudin, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas human capital karena mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan demikian, IPM memiliki peran dalam memengaruhi kinerja ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini IPM

digunakan sebagai variabel independen dalam model untuk menangkap pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis digunakan sebagai referensi dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa hasilnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan sebagai bentuk perbandingan dan gambaran bagi penulis dalam melakukan penelitian sejenis. Adapun Penelitian lain yang mendukung penelitian ini Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat Muhammad Danan Riyadi, Nenik Woyanti, (2022), di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Metode Regresi Data Panel (FEM)	- Dana Perimbangan - Rasio Belanja Modal - Tenaga Kerja - IPM	Secara parsial, variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	MAKSIMUM : Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 12, No. 1, 2022, pp: 13-26
2	Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia:	- Pertumbuhan Ekonomi - Belanja Modal	- Dana Perimbangan - PAD - IPM - Metode	Belanja modal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah	GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 5, No. 3,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendekatan Data Panel		Regresi Data Panel (REM)	melalui alokasi belanja modal yang tepat mampu menstimulasi aktivitas ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas produksi wilayah secara berkelanjutan.	2025, hal. 139-153
	Dwi Citra Haryati, Nurpiji, dkk, (2025), di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh				
3	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020-2021	- Pertumbuhan Ekonomi - Dana Perimbangan - PAD	- Rasio Belanja Modal - IPM - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas - Metode Analisis Rasio	Pengelolaan DAU, DAK, dan PAD berada dalam kategori tidak efisien namun sangat efektif dalam mencapai target realisasi anggaran. Pertumbuhan ekonomi daerah lebih dominan ditopang oleh efektivitas penyerapan anggaran dibandingkan efisiensi pengelolaannya, dengan tren pertumbuhan yang mencapai 6,43% pada tahun 2024.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. 11.D, 2025, hal. 447-456
	Nahara Jelita Putri, Muhammad Hi Hasan, dkk, (2025), di Kota Tidore Kepulauan				
4	Dampak Instrumen Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Panel Data di Provinsi Lampung	- Pertumbuhan Ekonomi - Dana Perimbangan - PAD - Metode Regresi Data Panel (FEM)	- Rasio Belanja Modal - IPM	Secara parsial, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	AkMen, Vol. 22, No. 3, 2025, hal. 325-339
	Berwin Anggara, (2025), di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung				
5	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - IPM	- Dana Perimbangan - Rasio Belanja Modal - Investasi	Hanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel desentralisasi fiskal dan investasi pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 57-72
	Agung Dinarjito, Almizar				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dharmazi, (2020), di Provinsi Kalimantan Timur			signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.	
6	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan - Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin Sayidah Fitri Alkhoiriyah, Chairul Sa'roni, (2021), di Kota Banjarmasin	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM	- Dana Perimbangan - PAD - Rasio Belanja Modal - Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial, IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mendorong produktivitas. Sebaliknya, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, di mana tingginya angka pengangguran menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembanguna n, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 299-309
7	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010– 2017 Yovita Sari, Aja Nasrun, Aning Kesuma Putri (2020), di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010– 2017	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM - Regresi Data Panel (FEM)	- Rasio Belanja Modal - Dana Perimbangan - PAD - Tingkat Kemiskinan	Kedua variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2017.	Equity: Jurnal Ekonomi Vol. 8 (1): Juni 2020: <i>halaman 1- 13, Juni 2020</i>
8	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Belanja Modal	- Dana Perimbangan - IPM - Metode Regresi Linier	Kemandirian fiskal (PAD) dan efektivitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	Berajah Journal, Vol. 4, No. 1, 2024, hal. 143-158

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi (Studi pada Pemerintah Kota Medan)		Berganda	ekonomi. Belanja modal juga terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, sedangkan efisiensi keuangan menunjukkan pengaruh yang bervariasi namun tetap relevan dalam menstimulasi output daerah.	
	Yusrida Ernawati, (2024), di Kota Medan				
9	Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD	- Dana Perimbangan - Rasio Belanja Modal - IPM - Metode Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan daerah pada dana bagi hasil migas serta belum optimalnya pengelolaan potensi PAD lokal.	Analisis: <i>Scientific Journal of Economics, Management, Accounting</i> , Vol. 14, No. 1, 2024, hal. 1-15
	Imam Fakhruddin, Billy Y. S., dkk, (2024), di Kabupaten Bengkalis				
10	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	- Pertumbuhan Ekonomi - Dana Perimbangan - PAD - Belanja Modal	- IPM - Metode Analisis SEM-PLS	Kinerja keuangan (yang mencakup rasio kemandirian/PAD, keserasian/belanja modal, dan derajat desentralisasi) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD dan pengelolaan dana perimbangan yang baik secara langsung mendorong kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur.	JIMMBA, Vol. 2, No. 3, 2020, hal. 346-357
	Joni Kristian Firdi Yanto, Susi Astuti (2020), Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2010-2019)	- Pertumbuhan Ekonomi - Dana Perimbangan - PAD	- Rasio Belanja Modal - IPM - Metode Regresi Linier Berganda	Secara parsial, PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota-kota Jawa Timur, yang menunjukkan perlunya optimalisasi sumber pendapatan di luar PAD. Sebaliknya, Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh nyata.	Diponegoro <i>Journal of Economics</i> , Vol. 11, No. 3, 2022, hal. 163-175
	Arif Hartadi, (2022), di 9 Kota Provinsi Jawa Timur				
12	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	- Pertumbuhan Ekonomi - Dana Perimbangan - PAD	- Rasio Belanja Modal - IPM - Metode Regresi Linier Berganda	Secara parsial, baik PAD maupun Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara individu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.	<i>Jurnal Development</i> , Vol. 11, No. 1, 2023, hal. 38-44
	Irmanelly, Noprihartini, dkk, (2023), di Provinsi Jambi				
13	Pengaruh Investasi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM	- Belanja Modal - Dana Perimbangan - PAD - Investasi - Inflasi - Metode Regresi Linier Berganda	Investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa) Volume 4, Nomor 1, April 2022
	Yuni Maulida, Abdul Hamid, Faisal Umardani Hasibuan, (2022) di Provinsi Aceh				
14	Efektivitas Kebijakan Fiskal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	- Pertumbuhan Ekonomi - Rasio Belanja Modal - IPM	- Dana Perimbangan - PAD - Metode Analisis Jalur (Path	Belanja langsung (termasuk belanja modal) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 2, 2022, hal. 114-130

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat di Papua		Analysis)	di Provinsi Papua.	
	Jemy Ricardo Parera, (2022), di Provinsi Papua				
15	Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Metode Regresi Data- Panel (FEM)	- Dana Perimbangan - Rasio Belanja Modal IPM	Rasio kemandirian (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, rasio efektivitas PAD justru berpengaruh negatif signifikan, dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Barat.	Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 12, 2025, hal. 8182-8191
	Rizqy Vebry Wibowo, Hendro Lukman, dkk, (2025), di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat				
16	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM sebagai variabel moderasi di Kabupaten Biak Numfor	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Dana Perimbangan	- IPM sebagai moderasi - Moderated Regretion Analisis - Lokasi penelitian kabupaten Biak Numfor	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan secara statistik. Sedangkan Dana Perimbangan justru memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun adanya penambahan dana perimbangan, namun tidak secara signifikan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Biak	Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Edisi Vol.18 No.1 Tahun 2023 P-ISSN 2085-3335; E-ISSN 2715-1840
	Andy Sahat Maasi Sigalingging, Rijal (2023), di Kabupaten Biak Numfor				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia Ichsan & Anistia Zurrahmi (2022)	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Dana Perimbangan - Regresi Data-Panel	- Periode penelitian - IPM - Rasio Belanja Modal - Lokasi Penelitian	Secara parsial, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE), Vol. 1 No. 1, 2022.
18	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 Endang Kusdiah Ningsih & Dwi Eka Noviaty (2019), Provinsi Sumatera Selatan	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - Dana Perimbangan	- Analisis Regresi Linear Berganda - IPM - Rasio Belanja Modal - Lokasi Penelitian - Periode Penelitian 2014-2018	Secara parsial, PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan.	Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 3 No. 2, 2019.
19	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Aulia Noor Rohmah AlQomariah, Sri Laksmi Pardanawati & Wikan Budi Utami (2022), Kabupaten Boyolali	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD	- Analisis Regresi Linear Berganda - DBH - IPM - RBM - Lokasi Penelitian Kabupaten Boyolali - Periode penelitian 2017-2020	Secara parsial, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU dan DBH berpengaruh signifikan. Secara simultan, PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Vol. 1 No. 2, 2022.
20	Pengaruh Investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Aldi Friyatna Dira, Kurniawan Prambudi Utomo, Mic Finanto Ario Bangun, Eigis Yani Pramularso, dan Faroman Syarief (2023), Provinsi	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM	- Metode analisis Regresi Linear Berganda - Lokasi - Modal - PAD - Dana	Secara parsial IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	Jurnal Ekombis Review, Vol. 11 No. 2, Juli 2023, hlm. 1437–1446.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kalimantan Timur		Perimbangan		
21	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015–2022 Dinda Rosyidah, Ari Saptono, & Agus Wibowo, Jawa Timur	- Pertumbuhan Ekonomi - IPM	- Upah Minimum Regional (UMR) - Jumlah Penduduk - Rasio Belanja Modal - PAD - Dana Perimbangan - Metode Regresi Linear Berganda	Secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, IPM, UMR, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	The Effect of Human Development Index, Regional Minimum Wage, and Population on Economic Growth in East Java 2015–2022 (Universitas Negeri Jakarta).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan tersebut dengan menggunakan data terbaru serta memasukkan variabel Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai faktor yang diduga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka.

2.2.1 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Secara teoritis, peningkatan dana perimbangan akan memperbesar kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Anggara (2025), Ichsan & Zurrahmi (2022), dan Hartadi (2022), menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa transfer pusat mampu menjadi katalisator utama aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, penelitian oleh Ernita et al. (2020), Sigalingging & Rijal (2023), Ningsih & Noviaty (2019), dan Irmanelly et al. (2023), menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa dana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bersifat inkonsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

2.2.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah,

yang pada akhirnya memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Riyadi & Woyanti (2022), Ernawati (2024), Wibowo & Lukman (2025), dan Ningsih & Noviaty (2019), menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti peningkatan pendapatan daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi secara langsung. Namun demikian, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan temuan berbeda. Anggara (2025), Sigalingging & Rijal (2023), Irmanelly et al. (2023), Ichsan & Zurrahmi (2022), Fakhruddin et al. (2024) serta AlQomariah et al. (2022), menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua peningkatan PAD secara otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi, melainkan bergantung pada efektivitas pemanfaatannya. Dengan demikian, hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks yang berbeda.

2.2.3 Hubungan Rasio Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana pendukung lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang. Rasio belanja modal mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan investasi dibandingkan dengan belanja operasional.

Secara teoritis, peningkatan belanja modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi distribusi, serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Dwi Citra Haryati et al. (2025) dan Ernawati (2024), yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Ricardo Parera (2022), menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya besarnya alokasi belanja modal yang penting, tetapi juga efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

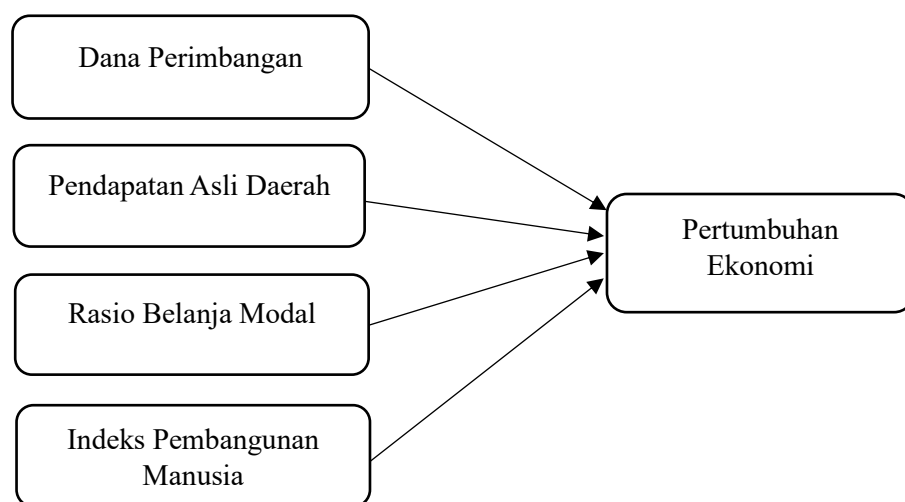
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang mengukur kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Secara teoritis, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Dinarjito & Dharmazi (2020), Alkhoiriyah Sayidah Fitri (2021), Maulida et al. (2022), Dira et al. (2023) dan Rosyidah et al. (2024), menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa peningkatan kualitas manusia berdampak langsung terhadap peningkatan output ekonomi. Namun, (Sari et al., 2020) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian hubungan antar variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dan PAD sebagai indikator desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, rasio belanja modal dan IPM juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas belanja daerah serta pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam konteks penelitian ini.

Hubungan tersebut kemudian disusun ke dalam kerangka pemikiran sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang perlu dibuktikan melalui pengujian empiris. Dalam penelitian ini, hipotesis disusun berdasarkan landasan teori

desentralisasi fiskal dan teori pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025.
2. Diduga secara bersama-sama terdapat pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025.